



WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2024-2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2024-2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 06);
11. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2023 Nomor 5);
14. Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padangsidimpuan;

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
7. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2024-2026 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan;
8. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran PD yang tertuang dalam Renstra PD Tahun 2024-2026 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan;
9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
12. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah, sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2024-2026;
13. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD, sebagaimana tertuang dalam Renstra PD Tahun 2024-2026;
14. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahunan;
15. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan

Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup IKU terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Kota; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- (1) IKU Pemerintah Daerah dengan IKU Perangkat Daerah harus selaras dan sinkron;
- (2) IKU untuk setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Kota sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil (outcome); dan
 - b. IKU Perangkat Daerah sekurang-kurangnya merupakan indikator keluaran (output).

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. dokumen RPD dan atau Renstra Perangkat Daerah, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

Indikator Kinerja Utama digunakan untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam dokumen

RPD dan Renstra PD harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah perlu melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan singkat dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB V

PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja;
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU kedalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
- (3) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal 19 Juni 2024

Pj. Wali Kota Padangsidimpuan,

Ttd.

Timur Tumanggor

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 19 Juni 2024

Sekretaris Daerah
Kota Padangsidimpuan,

Ttd.

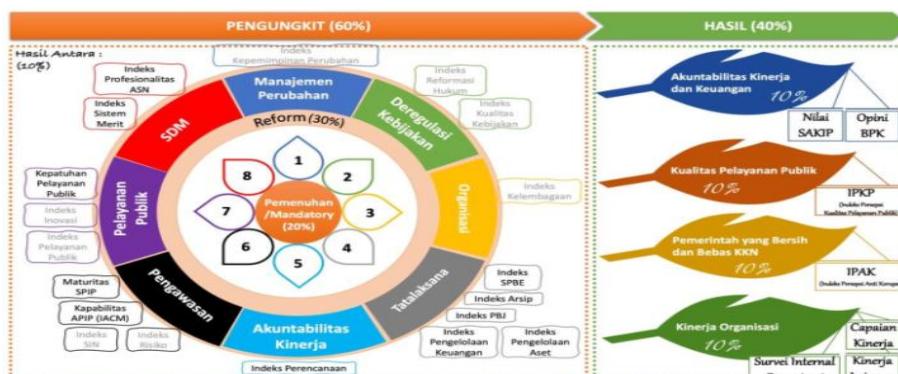
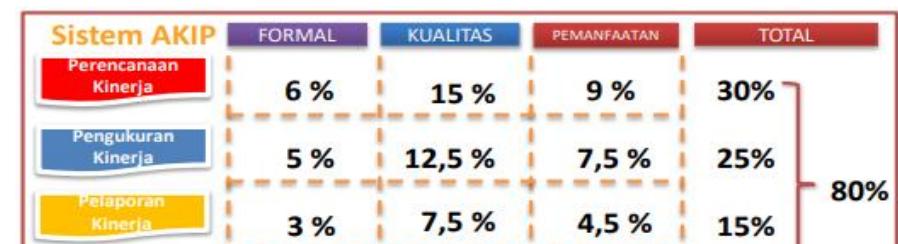
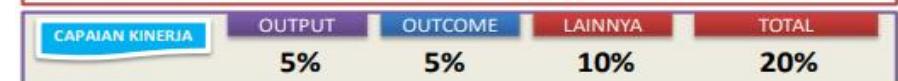
Letnan

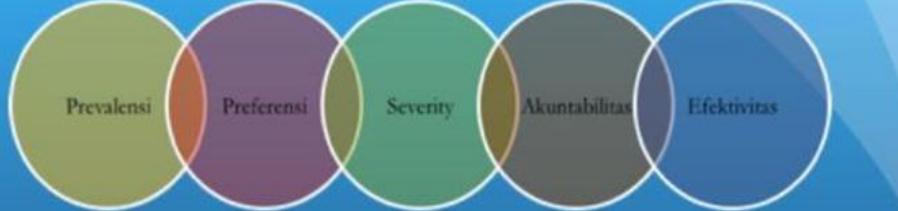
BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 NOMOR 25



LAMPIRAN I:
PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																																					
1	2	3	4	5	6																																					
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	 <p>The diagram illustrates the Performance Measurement System (PMS) structure. It starts with 'PENGUNGKIT (60%)' on the left, which includes 'Indeks Profesionalitas ASN', 'Indeks Sistem Merit', and 'Kepatuhan Publik'. This leads to 'Manajemen Perubahan Reform (30%)', which includes 'Indeks Kepemimpinan Perubahan', 'Indeks Kepatuhan Hukum', and 'Indeks Kualitas Kebijakan'. This is further divided into 'Pemenuhan /Mandatory (20%)' (labeled 1-8) and 'Deregulasi Kebijakan' (labeled 9-12). The right side shows 'HASIL (40%)' with 'Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan' (10%) and 'Nilai SAKIP' and 'Opini BPK'. Below it are 'Kualitas Pelayanan Publik' (10%), 'IPCP (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik)', 'Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN' (10%), 'IPAK (Indeks Persepsi Anti Korupsi)', 'Kinerja Organisasi' (10%), 'Capaian Kinerja', 'Kinerja Organisasi', and 'Survei Internal Organisasi'. The bottom section shows 'Pengawasan' and 'Tatalaksana'.</p>	Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Kementerian PAN dan RB																																					
1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sistem AKIP</th> <th>FORMAL</th> <th>KUALITAS</th> <th>PEMANFAATAN</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>6 %</td> <td>15 %</td> <td>9 %</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>5 %</td> <td>12,5 %</td> <td>7,5 %</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3 %</td> <td>7,5 %</td> <td>4,5 %</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>2 %</td> <td>5 %</td> <td>3 %</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAPAIAN KINERJA</th> <th>OUTPUT</th> <th>OUTCOME</th> <th>LAINNYA</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5%</td> <td>5%</td> <td>10%</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	Sistem AKIP				FORMAL	KUALITAS	PEMANFAATAN	TOTAL	Perencanaan Kinerja	6 %	15 %	9 %	30%	Pengukuran Kinerja	5 %	12,5 %	7,5 %	25%	Pelaporan Kinerja	3 %	7,5 %	4,5 %	15%	Evaluasi Kinerja	2 %	5 %	3 %	10%	CAPAIAN KINERJA	OUTPUT	OUTCOME	LAINNYA	TOTAL	5%	5%	10%	20%	➤ Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ➤ Sekretariat Daerah ➤ Inspektorat	Laporan Hasil Penilaian Kementerian PAN dan RB
Sistem AKIP				FORMAL	KUALITAS	PEMANFAATAN	TOTAL																																			
Perencanaan Kinerja	6 %	15 %	9 %	30%																																						
Pengukuran Kinerja	5 %	12,5 %	7,5 %	25%																																						
Pelaporan Kinerja	3 %	7,5 %	4,5 %	15%																																						
Evaluasi Kinerja	2 %	5 %	3 %	10%																																						
CAPAIAN KINERJA	OUTPUT	OUTCOME	LAINNYA	TOTAL																																						
5%	5%	10%	20%																																							
1.2	Meningkatnya	Indeks Persepsi	Melalui survei pihak eksternal	Inspektorat Daerah	Survey																																					

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
pengelolaan keuangan daerah berkualitas	Anti Korupsi		<p>DIMENSI IPK</p>  <p>Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan nilai rerata sederhana dari kelima dimensi pengukuran korupsi di atas. Secara matematis formula perhitungan indeks persepsi korupsi tersebut sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Persepsi Korupsi} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{x_k}{n}$		Penilaian Integritas (SPI) eksternal oleh KPK
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		<p>Penentuan bobot Dimensi IPKD adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (15) Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (20) Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (15) Penyerapan anggaran (20) Kondisi keuangan daerah (15) Opini BPK atas LKPD (15) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; ➤ Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; ➤ Dinas Komunikasi dan Informatika; ➤ Inspektorat 	IPKD

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	<p>Penghitungan Indeks</p> <ol style="list-style-type: none"> Menentukan nilai untuk setiap indikator <ul style="list-style-type: none"> Nilai per indikator: $\left(\frac{\text{nilai } F01 + \text{nilai } F02 + \text{nilai } F03}{3} \right) \times \text{bobot perindikator}$ Menentukan nilai ASPEK <ul style="list-style-type: none"> Nilai per aspek: $\sum \text{nilai perindikator}$ Menentukan indeks <ul style="list-style-type: none"> Nilai indeks: $\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$ <p>Menentukan nilai INDIKATOR ↓ Menentukan nilai ASPEK ↓ Menentukan nilai INDEKS</p> <p>Pembobotan Aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan Pelayanan (30%) Profesionalisme SDM (18%) Sarana Prasarana (15%) Sistem Informasi Pelayanan Publik (15%) Konsultasi dan Pengaduan (15%) Inovasi (7%) 	Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Kementerian PAN dan RB
2	Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan Baplitbangda 	BPS
		Tingkat Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Sosial Dinas Ketenagakerjaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 	

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
2.1	Meningkatnya kualitas Pendidikan dan kepribadian masyarakat	Indeks Pendidikan	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Ket:</p> <p>HLS = Harapan Lama Sekolah HLS maks = 18; HLS min = 0 RLS = Rata-rata Lama Sekolah RLS maks = 15; RLS min = 0</p>	Dinas Pendidikan	BPS
2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	Dinas Kesehatan	BPS
2.3	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	PDRB per Kapita	$\frac{PDRB \text{ adh Berlaku}}{Jumlah Penduduk} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinas Sosial; ➤ Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 	BPS
		Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana:</p> <p>Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika:</p> <p>$G < 0,3$ = ketimpangan rendah $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; ➤ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; ➤ Dinas Ketahanan Pangan 	BPS
2.4	Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menganggur}{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja} \times 100\%$	Dinas Ketenagakerjaan	BPS

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatkan kualitas perekonomian berkelanjutan berbasis sektor unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t = tahun berjalan t-1 = tahun sebelumnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinas Pertanian; ➤ Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan; ➤ Dinas PMPTSP ➤ Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 	BPS
3.1	Meningkatnya kapasitas sektor ekonomi unggulan daerah	LPE Kategori Pertanian	$\frac{PDRB_{(PKP)t} - PDRB_{(PKP)t-1}}{PDRB_{(PKP)t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t = tahun berjalan t-1 = tahun sebelumnya P = Kategori Pertanian</p>	Dinas Pertanian	BPS
		LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	BPS
		LPE Kategori Jasa	$\frac{PDRB_{(PKP)t} - PDRB_{(PKP)t-1}}{PDRB_{(PKP)t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t = tahun berjalan t-1 = tahun sebelumnya P = Kategori Jasa mencakup Jasa keuangan dan asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa kesehatan dan kegiatan sosial, Jasa Lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinas PMPTSP; ➤ Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 	BPS

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA						
1	2	3	4	5	6						
3.2	Meningkatnya kualitas pemerataan infrastruktur pembangunan	Indeks Infrastruktur	<p>Indeks Infrastruktur Tingkat Provinsi = $0,3255 x jalan + 0,3343 x air + 0,5133 x sanitasi + 0,5033 x pkpl + 0,5153 x i_kom_inv$</p> <p>Variabel Indeks Infrastruktur :</p> <table border="1"> <tr> <td>Definisi</td> </tr> <tr> <td>% Kondisi jalan dalam keadaan mantab tahun-x</td> </tr> <tr> <td>% Keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun-x</td> </tr> <tr> <td>% Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun-x</td> </tr> <tr> <td>% Keluarga Pengguna Listrik PLN dan non PLN</td> </tr> <tr> <td>Telekomunikasi (Tingkat mengukur sinyal telepon dan sinyal internet di suatu daerah)</td> </tr> </table>	Definisi	% Kondisi jalan dalam keadaan mantab tahun-x	% Keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun-x	% Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun-x	% Keluarga Pengguna Listrik PLN dan non PLN	Telekomunikasi (Tingkat mengukur sinyal telepon dan sinyal internet di suatu daerah)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinas PUTR; ➤ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; ➤ Dinas Perhubungan 	Baplitbangda
Definisi											
% Kondisi jalan dalam keadaan mantab tahun-x											
% Keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun-x											
% Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun-x											
% Keluarga Pengguna Listrik PLN dan non PLN											
Telekomunikasi (Tingkat mengukur sinyal telepon dan sinyal internet di suatu daerah)											
3.3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	$\text{Persentase Penurunan Emisi GRK} = \frac{\text{Emisi GRK}_{(n)} - \text{Emisi GRK}_{(n-1)}}{\text{Emisi GRK}_{(n-1)}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup	Baplitbangda (Aplikasi Aksara)						

Pj. Wali Kota Padangsidimpuan,

Ttd.

Timur Tumanggor

Diundangkan di Padangsidimpuan pada tanggal 19 Juni 2024

Sekretaris Daerah
Kota Padangsidimpuan,

Ttd.

Letnan



LAMPIRAN II:
PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

1. DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan masyarakat berpendidikan berdaya saing yang dan	Harapan Lama Sekolah	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ <p>Ket: HLS = Harapan Lama Sekolah HLS maks = 18; HLS min = 0</p>	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan
		Rata-rata Lama Sekolah	$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ <p>Ket: RLS = Rata-rata Lama Sekolah RLS maks = 15; RLS min = 0</p>	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
	Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Dasar/sederajat	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7 – 12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7 – 12 Tahun}} \times 100$	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
	Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama/sederajat	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13 – 15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13 – 15 Tahun}} \times 100$	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
2	Meningkatkan pelestarian warisan budaya	Persentase pelestarian warisan budaya	$\frac{\text{Jumlah Warisan budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Warisan budaya yang ada}} \times 100$	Bidang Pembinaan Ketenagaan	
	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang ada}} \times 100$	Bidang Pembinaan Ketenagaan	
3	Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Dinas Pendidikan	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Dinas Pendidikan	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan	

2. DINAS KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN /SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack	Dinas Kesehatan	BPS
	Menurunnya Morbiditas dan Mortalitas	Angka Kesakitan	$\frac{\text{Jumlah total penyakit di suatu wilayah tertentu}}{\text{Jumlah penduduk di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit (P2P)	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	$\frac{\text{Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	$AKB = \frac{D_{0-1\text{th}} \times 1000}{\Sigma \text{ Lahir Hidup}}$ <p>Dimana:</p> <p>AKB = Angka Kematian Bayi / Infant Mortality Rate (IMR)</p> <p>$D_{0-1\text{th}}$ = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu di daerah tertentu.</p> <p>$\Sigma \text{ Lahir hidup}$ = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu di daerah tertentu</p>	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan	Persentase Penerapan RT Ber – PHBS	$\frac{\text{Jumlah RT Ber PHBS}}{\text{Jumlah seluruh RT}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
2	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Kesehatan	$\frac{\text{Total nilai persepsi dari seluruh responden}}{\text{Total unsur yang terisi dari seluruh responden}} \times 25$	RSU	RSU

NO	TUJUAN /SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Re-akreditasi		$\frac{\text{Jumlah Puskesmas Re Akreditasi}}{\text{jumlah seluruh puskesmas}} \times 100\%$	Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Bed Occupancy Rate (BOR)		$\frac{\text{Jumlah Hari Perawatan Rumah Sakit}}{(\text{jumlah tempat tidur} \times \text{jumlah hari dalam satu periode})} \times 100\%$	RSU	Rumah Sakit Umum
	Average Length Of Stay (AVLOS)		$\frac{\text{Jumlah Lama Dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$	RSU	Rumah Sakit Umum
	Bed Turn Over (BTO)		$\frac{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}}$	RSU	Rumah Sakit Umum
	Turn Over Interval (TOI)		$\frac{(\text{Jumlah Tempat Tidur} \times \text{Periode}) - \text{Jumlah Hari Perawatan}}{\text{jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$	RSU	Rumah Sakit Umum
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Dinas Kesehatan	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Dinas Kesehatan	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kapasitas Konektivitas Wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	$\beta = \frac{e}{v}$ $\beta = \text{Indeks Konektivitas}$ $e = \text{banyaknya jalan}$ $v = \text{banyaknya kota}$	Bidang Bina Marga	PUTR Kota Padangsidimpuan
	Meningkatkan kualitas jalan	Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik} + \text{panjang jalan kondisi sedang}}{\text{Panjang jalan kota}} \times 100\%$		

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
2	Mewujudkan pembangunan infrastruktur sesuai tata ruang wilayah	Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Persetujuan KKPR (kesesuaian pemanfaatan Ruang non berusaha + jumlah rekomendasi IMB}}{\text{Jumlah usulan rekomendasi persetujuan KKPR (kesesuaian pemanfaatan ruang non berusaha + jumlah usulan IMB}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang	
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam IMB	Rasio kepatuhan IMB	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi IMB}}{\text{Jumlah usulan IMB}} \times 100\%$		
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Dinas PUTR	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan	Tingkat capaian indikator sasaran daerah	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		Dinas PUTR

4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Perumahan, Kawasan Permukiman Nyaman	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Nyaman	$\frac{\text{Jumlah Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditangani}}{\text{Jumlah Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padangsidimpuan}} \times 100\%$	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya Kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Persentase prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik	0,5 (Persentase Infrastruktur Jalan Lingkungan) + 0,5 (Persentase PJU)		
	Meminimalisir konflik sengketa lahan	Persentase lahan yang bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah lahan yang tersertifikasi}}{\text{Jumlah persil lahan Kota Padangsidimpuan}} \times 100\%$		
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padangsidimpuan	Nilai SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padangsidimpuan	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Dinas	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Perumahan dan	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padangsidimpuan	Kawasan Permukiman Kota Padangsidimpuan			Padangsidimpuan

5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Keamanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Layanan terhadap Masyarakat yang terdampak Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Penegakan Perda/Perkada	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, dan Keindahan)}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang dilaporkan masyarakat dan petugas}} \times 100\%$	Bidang Tribum dan Bidang PPUD	Satpol PP
	Meningkatnya upaya Penegakan Perda dan Perkada serta Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Umum	Percentase Penegakan Perda/Perkada dan Penyelesaian Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Umum			
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Satpol PP	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja	Capaian indikator sasaran		

6. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas penanganan kebakaran	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap		Bidang Pemadam	1. Dinas Pemadam Kebakaran dan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran serta kondisi membahayakan manusia	(response time rate) penanganan kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap (response time) $\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran}}{\text{Jumlah layanan evakuasi korban kebakaran}} \times 100\%$		Bidang Pemadam	Penyelamatan 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Tim Tanggap Darurat Kebakaran pada bangunan Gedung dan Industri 4. Kepala Lingkungan, Kepala Desa/Lurah dan/atau pengelola lingkungan lainnya 5. Satuan relawan kebaran
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	$\frac{\text{Jumlah layanan evakuasi korban kebakaran}}{\text{Jumlah kasus evakuasi kebakaran}} \times 100\%$			
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemedam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase pelayanan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Non Kebakaran)	$\frac{\text{Jumlah layanan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia}}{\text{Jumlah kasus evakuasi pada kondisi membahayakan manusia}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan	Dinas Pemedam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Dinas Pemedam Kebakaran dan Penyelamatan	Nilai SAKIP Dinas Pemedam Kebakaran dan Penyelamatan	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan		
			Rata-rata capaian indikator sasaran	Sekretariat	Dinas Pemedam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan

7. DINAS SOSIAL KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan PPKS	Persentase Penurunan PPKS	$\frac{\text{Jumlah KPM Graduasi}}{\text{Jumlah Penerima Bansos Bersyarat}} \times 100\%$	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
	Meningkatnya kuantitas penanganan PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PPKS yang ada}} \times 100\%$	Bidang Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
	Meningkatnya Layanan Yang Berkualitas Oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial	$\frac{\text{IPS Perorangan} + \text{IPS Lembaga}}{2}$	Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Dinas Sosial	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan Dinas Sosial	Tingkat capaian Indikator sasaran Dinas Sosial	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$	Dinas Sosial	Dinas Sosial

8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Resiko Dan Dampak Bencana	Indeks Resiko Bencana	$R \approx H * \frac{V}{C}$ <p>Dimana :</p> <p>R = Tingkat Resiko Bencana</p> <p>H = Indeks Bahaya</p> <p>V = Indeks Kerentanan</p> <p>C = Indeks Kapasitas</p>	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BNPB Penilai IRB

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Masyarakat Dalam Dalam Bencana Penanganan Daerah	Percentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}}{\text{jumlah desa tangguh}} \times 100\%$		BPBD Padangsidimpuan
		Rata-Rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Penanganan Bencana Alam	Lama waktu menuju ke lokasi bencana	Bidang Kedaruratan Logistik	
		Percentase Penanganan Pasca Bencana Yang Sesuai Standar Kelayakan Dan Keselamatan	$\frac{\text{Jumlah daerah dampak bencana}}{\text{Jumlah bencana di tangani}} \times 100\%$	Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi	
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP BPBD Kota Padangsidimpuan	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Sekretariat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya Kulaitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		BPBD Padangsidimpuan

9. DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio Penduduk yang Bekerja	$\frac{\text{Jumlah Orang Bekerja}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
	Meningkatnya peluang kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Orang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$		
2	Terciptanya hubungan Industrial yang harmonis	Percentase Penyelesaian kasus hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah Perselisihan yang tertangani}}{\text{Jumlah perselisihan di daerah kota}} \times 100\%$	Bidang Pendataan dan	

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak}}{\text{Jumlah total perusahaan}} \times 100\%$	Pembinaan Hubungan Ketenagakerjaan	
3	Meningkatkannya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Ketenagakerjaan	Nilai SAKIP Dinas Ketenagakerjaan	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Sekretariat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan daerah Dinas Ketenagakerjaan	Tingkat capaian indikator sasaran Dinas Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		Dinas Ketenagakerjaan

10. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$1/3 [Xede(1) + Xede(2) + Linc-Dist]$ <p>Xede(1) = Xede untuk harapan hidup</p> <p>Xede(2) = Xede untuk pendidikan</p> <p>Linc-dist = Indeks distribusi pendapatan</p>	Bidang Pemberdayaan Perempuan	BPS; Disnaker; Sekretariat DPRD

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<p>IDG adalah merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.</p> <p>IDG = 1/3 (Ipar +IDM+Lin-Dist) dimana,</p> <p>Ipar = Indeks keterwakilan di parlemen (DPRD)</p> <p>IDM =Indeks pengambilan keputusan</p> <p>Lin-Dist = Indeks distribusi pendapatan</p> <p>Keterwakilan di parlemen = Proporsi keterwakilan di Parlemen laki-laki dan perempuan</p> <p>Pengambilan Keputusan = Proporsi dari manager, Staf Administrasi, pekerja profesional dan teknisi laki-laki dan perempuan</p> <p>Distribusi Pendapatan = Upah buruh non pertanian laki-laki dan perempuan</p>		
2	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	$\frac{\text{Jumlah korban yang ditangani}}{\text{Jumlah kasus yang terjadi}} \times 100\%$	PP PA	UPT PPA
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Ratio Perempuan korban kekerasan per 10.000 termasuk TPPO (usia 18 Tahun ke atas)	$\frac{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan}}{\text{Jumlah perempuan usia 18 tahun ke atas}} \times 10.000$		
	Menurunnya kekerasan terhadap anak	Ratio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 10.000 anak (0-18 Tahun)	$\frac{\text{Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus}}{\text{Jumlah anak (0 - 18 tahun)}} \times 10.000$		
3	Meningkatkan Kesejahteraan Anak	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Aspek PHA	Bidang Perlindungan Anak	Kementerian PP PA
	Meningkatnya kondisi pembangunan yang berpihak pada anak	Skor Kabupaten/Kota Layak Anak	Penilaian Tim dari Kementerian PP dan PA terhadap 24 Indikator Kota Layak Anak		Kementerian PP PA

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas PP PA	Nilai SAKIP	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	PP PA	Inspektorat Kota
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan Dinas PP PA	Tingkat Capaian Indikator Sasaran	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$	PP PA	Dinas PP PA

11. DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kemandirian Pangan di Kota Padangsidimpuan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	$Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$ <p>Dimana:</p> <p>i : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9 j : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98 Y_j : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j</p>	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Pangan Daerah	Pola Pangan Harapan (PPH)	<p>Skor PPH : % AKE x Bobot</p> <p>Skor PPH : Skor Pola Pangan Harapan</p> <p>% AKR : Persentase Angka Kecukupan Energi</p> <p>Bobot : Bobot setiap golongan bahan pangan</p>	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Sekretariat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Ketahanan Pangan	Capaian Indikator Sasaran		Dinas Ketahanan Pangan

12. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = (IKA.30%) + (IKU.30%) + (ITH.40%)	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas	Kementerian LHK
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	$Ipj = \sqrt{(Ci/Lij)^2M + (Ci/Lij)^2R}$ <p><u>Ket:</u> - Ci / Lij M = nilai maksimum dari Ci / Lij - Ci / Lij R = nilai rata-rata dari Ci/Lij</p>	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas	
		Indeks Kualitas Udara	$\text{Indeks Kualitas Udara} = 100 - \{50/0,9 \times (ieu-0,1)\}$ <p>Keterangan: - Ieu = rata-rata (SO_2 hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien SO_2 Ref EU dan NO_2 hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien NO_2 Ref EU)</p>		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$\text{ITH} = 100 - (84,3 - (\text{TH} \times 100)) \times 50/54,3$ <p>Keterangan: - ITH = Indeks Tutupan Hutan - TH = Tutupan Hutan</p>		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Sekretariat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Ketahanan Pangan	Rata-rata Capaian Indikator Sasaran		Dinas Ketahanan Pangan

13. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Kependudukan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur x Nilai Penimbang	Bidang Inovasi	Disdukcapil Kota Padangsidimpuan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Kepemilikan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Masyarakat yang memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang sudah memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil}}{\text{Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil}} \times 100\%$	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dirjend Dukcapil Kemendagri
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Sekretariat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Capaian Indikator Sasaran		Disdukcapil Kota Padangsidimpuan

14. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan pembangunan wilayah perdesaan	Indeks Desa Membangun	$I_x = \frac{\sum_1^n skor x}{n_x \times 5}$ $I_x = \text{Indeks}$ $n = \text{Jumlah Indikator}$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
	Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Percentase Desa Maju	$\frac{\text{Jumlah Desa Maju}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Dinas PMD
		Percentase BUMDES yang berkontribusi terhadap pendapatan Asli Desa	$\frac{\text{Jumlah BUMDES Aktif}}{\text{Jumlah BUMDES}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan	Dinas PMD
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Sekretariat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rata-rata Capaian Indikator Sasaran		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

15. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Tujuan Taraf Hidup Keluarga	Percentase Menurunnya Keluarga Pra Sejahtera	$\frac{\text{Jumlah Keluarga Kategori Pra Sejahtera}}{\text{Jumlah Keluarga Sejahtera}} \times 100\%$	DPPKB	DPPKB
	Meningkatkan Kualitas Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate	$TFR = 5 \sum_{i=1}^5 ASFR_i$ $ASFR = bi / Pif \times K$	Bidang Pengendalian Penduduk	Data BKKBN
	Meningkatnya Perencanaan Keluarga	Percentase peserta KB aktif	$\frac{\text{Capaian MKJP}}{\text{PA}} \times 100\%$	Bidang Pembina Keluarga Berencana	Data BKKBN
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Sekretariat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatkan kualitas kinerja pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tingkat capaian indikator sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		DPPKB

16. DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kapasitas	Indeks Konektivitas	$\beta = \frac{e}{v}$	Bidang lalu lintas	Dishub; PUTR Kota

$$\beta = \text{Indeks Konektivitas} \quad e = \text{banyaknya jalan} \quad v = \text{banyaknya kota}$$

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Konektivitas Wilayah	Wilayah		dan angkutan jalan	Padangsidimpuan
	Meningkatkan kualitas jalan	Persentase Fasilitas dan Perlengkapan Jalan	$\frac{\text{Jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah target Kebutuhan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Bidang prasarana dan sarana	Dishub
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Sekretariat Dishub	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Dinas Perhubungan	Tingkat capaian indikator sasaran Dinas Perhubungan	Capaian Indikator Sasaran		Dishub

17. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan berbasis elektronik	$\text{Indeks Domain}_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ <p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ND_j adalah nilai indeks domain ke-j; • BD_j adalah nilai bobot domain ke-j. 	Dinas Komunikasi dan Informatika	Berdasarkan kriteria penilaian dari aplikasi evaluasi SPBE dari Kemenpan RB
	Meningkatnya layanan Publik Berbasis IT	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah layanan publik}} \times 100\%$	Bidang Pengelolaan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Pemanfaatan IT pada Penyelenggaraan	Persentase OPD yang terhubung dengan akses Internet yang disediakan oleh Diskominfo		Bidang Prasarana dan Sarana Komunikasi	

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Pemerintah		$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Kominfo}}{\text{Jumlah total OPD}} \times 100\%$		
	Meningkatnya Keamanan Dokumen Negara	Persentase dokumen yang telah menggunakan sandi dalam keamanan komunikasi perangkat daerah	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi}}{\text{Jumlah total OPD}} \times 100\%$		
	Meningkatnya Validitas Data dan Informasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Persentase data dan informasi pembangunan yang tersedia dan terupdate	$\frac{\text{Jumlah OPD yang mengupdate data pembangunan}}{\text{Jumlah total OPD}} \times 100\%$	Bidang Pengelolaan Informasi	
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidimpuan	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidimpuan	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidimpuan	Tingkat Capaian indikator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidimpuan	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Peran Investasi Daerah dalam pembangunan Perekonomian	Persentase Peningkatan Investasi Daerah Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah nilai investasi tahun berkenan} - \text{jumlah nilai investasi tahun lalu}}{\text{Jumlah nilai investasi tahun lalu}} \times 100\%$	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padangsidimpuan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi tahun berkenan		
2	Meningkatkan Akuntabilitas	Nilai SAKIP Dinas	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota	Sekretariat	Inspektorat Daerah

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Kinerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Padangsidimpuan	Kota Padangsidimpuan	Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tingkat Pencapaian Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Capaian Indikator Sasaran		Dinas Penanaman Modal dan PTSP

19. DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	$IPLM = \frac{\sum UPLM}{AM} \times 100$ <p>IPLM = Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat keperpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan AM = Aspek Masyarakat</p>	Bidang Perpustakaan	Dinas Perpustakaan
	Meningkatnya minat baca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Diukur menggunakan survey / kajian kegemaran membaca Masyarakat		
2	Meningkatkan kapasitas kearsipan daerah	Indeks Pengawasan Karsipan	Berdasarkan penilaian dari ANRI	Bidang Arsip	
	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	$\frac{Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku}{Jumlah seluruh OPD} \times 100\%$		

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Sekretariat Perpustakaan	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya kualitas Kinerja perencanaan Pembangunan Dinas Perpustakaan	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Perpustakaan	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		Dinas Perpustakaan

20. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan dan Mengembangkan kepemudaan dan kepramukaan yang mandiri, inovatif, kompetitif, inklusif dan berkarakter	Persentase pemuda yang berprestasi tingkat provinsi, nasional dan internasional	$\frac{\text{Jumlah Pemuda yang berprestasi tingkat provinsi, nasional dan internasional}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16 – 30)tahun di Kota Padangsidimpuan}} \times 100\%$	Bidang Kepemudaan dan Bidang Keolahragaan	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Berkembangnya pemuda yang inovatif, kompetitif dan berkarakter	Persentase Pemuda yang Aktif dalam Kepeloporan, Kepramukaan, kepemimpinan dan kewirausahaan	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang aktif dalam kepeloporan, kepramukaan, kepemimpinan dan kewirausahaan}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16 – 30)tahun di Kota Padangsidimpuan}} \times 100\%$		
2	Meningkatkan Kapasitas Keolahragaan Daerah	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	$\frac{\text{Jumlah medali tahun } n - \text{jumlah medali tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah medali tahun } (n - 1)} \times 100\%$	Bidang Keolahragaan	
	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase prestasi olahraga di tingkat provinsi, nasional dan internasional terhadap atlit yang dikirim	$\frac{\text{Jumlah perolehan medali tingkat provinsi, nasional dan internasional}}{\text{Jumlah atlet yang dikirim}} \times 100\%$		

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatkan Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	$\frac{\text{Jumlah PAD sektor pariwisata tahun } n - \text{Jumlah PAD sektor pariwisata tahun } (n-1)}{\text{Jumlah PAD sektor pariwisata tahun } (n-1)} \times 100\%$	Bidang Pariwisata	
	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } (n-1)}{\text{Jumlah wisatawan tahun } (n-1)} \times 100\%$		
4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan	Nilai SAKIP Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Sekretariat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan	Tingkat capaian indikator sasaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

21. DINAS PERTANIAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Pertumbuhan Komoditas Pertanian dan Perikanan	LPE Sub Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Hasil Perhitungan dari BPS	Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dan Bidang Perikanan	BPS
	Meningkatnya mutu produksi pertanian dan perikanan	Produktivitas Pertanian	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian tahun } n}{\text{Luas lahan tahun } n} \times 100\%$		
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian	Nilai SAKIP Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Sekretariat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan Dinas Pertanian	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Pertanian	Capaian Indikator Sasaran		Dinas Pertanian

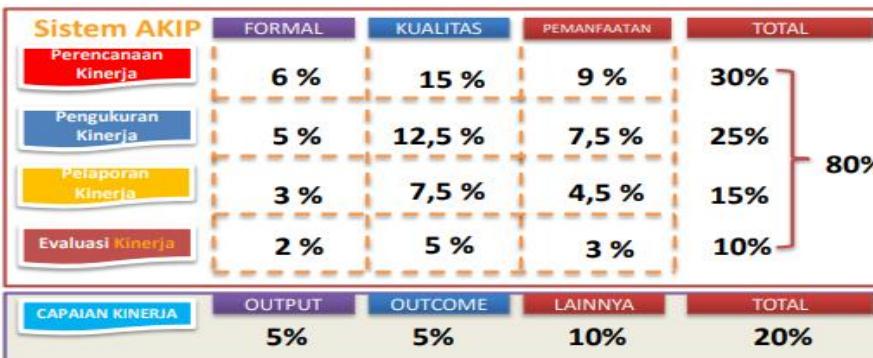
22. DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	$\frac{PDRB \text{ tahun } (n) - PDRB \text{ tahun } (n - 1)}{PDRB \text{ tahun } (n - 1)} \times 100\%$	Bidang Perdagangan	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
	Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan Tahun n		
2	Meningkatkan Kapasitas Industri Kecil Industri Kecil dan Menengah	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang naik skala usaha	$\frac{Jumlah IKM yang naik skala usahanya}{Jumlah IKM di Kota Padangsidimpuan} \times 100\%$	Bidang Perindustrian	
	Meningkatnya Partisipasi IKM dalam Perekonomian Daerah	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Aktif	$\frac{Jumlah IKM yang aktif}{Jumlah seluruh IKM} \times 100\%$		
3	Meningkatnya Kapasitas UMKM Daerah	Persentase UMKM yang Naik Skala Usaha	$\frac{Jumlah UMKM yang naik skala usahanya}{Jumlah UMKM di Kota Padangsidimpuan} \times 100\%$	Bidang Koperasi UMKM	
	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah Baru	Pertumbuhan Usaha kecil Menengah Baru	$\frac{Jumlah UKM tahun (n) - Jumlah UKM tahun (n - 1)}{Jumlah UKM tahun (n - 1)} \times 100\%$		
	Optimalisasi Kinerja dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Persentase Koperasi yang Aktif	$\frac{Jumlah Koperasi Aktif}{Jumlah Seluruh Koperasi} \times 100\%$		
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Dearah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	dan Perdagangan				
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$	Sekretariat	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

23. SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Birokrasi Reformasi		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Kemenpan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah daerah	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	<p>IKM = $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$</p> <p>Dimana:</p> $\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p>	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Hasil Survei

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																																							
1	2	3	4	5	6																																							
			<p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1,00-2,5996</td><td>25,00-64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2,60-3,064</td><td>65,00-76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr> <tr> <td>3</td><td>3,0644-3,532</td><td>76,6-88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>4</td><td>3,5324-4,00</td><td>88,31-100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik	2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644-3,532	76,6-88,30	B	Baik	4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik																
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																																								
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik																																								
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik																																								
3	3,0644-3,532	76,6-88,30	B	Baik																																								
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik																																								
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kota Padangsidimpuan	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sistem AKIP</th> </tr> <tr> <th>Perencanaan Kinerja</th> <th>FORMAL</th> <th>KUALITAS</th> <th>PEMANFAATAN</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 %</td> <td>15 %</td> <td>9 %</td> <td>30 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 %</td> <td>12,5 %</td> <td>7,5 %</td> <td>25 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 %</td> <td>7,5 %</td> <td>4,5 %</td> <td>15 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 %</td> <td>5 %</td> <td>3 %</td> <td>10 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">CAPAIAN KINERJA</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="4">5% 5% 10% 20%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Sistem AKIP				Perencanaan Kinerja	FORMAL	KUALITAS	PEMANFAATAN	TOTAL	6 %	15 %	9 %	30 %		5 %	12,5 %	7,5 %	25 %		3 %	7,5 %	4,5 %	15 %		2 %	5 %	3 %	10 %		CAPAIAN KINERJA				TOTAL	5% 5% 10% 20%					Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Kemenpan
Sistem AKIP																																												
Perencanaan Kinerja	FORMAL	KUALITAS	PEMANFAATAN	TOTAL																																								
6 %	15 %	9 %	30 %																																									
5 %	12,5 %	7,5 %	25 %																																									
3 %	7,5 %	4,5 %	15 %																																									
2 %	5 %	3 %	10 %																																									
CAPAIAN KINERJA				TOTAL																																								
5% 5% 10% 20%																																												
	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai LPPD (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Skor kinerja</th> <th>Status Kinerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>1.00-1.80</td> <td>Sangat Rendah</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>1.81-2.60</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>2.61-3.40</td> <td>Sedang</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>3.41-4.20</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>4.21-5.00</td> <td>Sangat Tinggi</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Skor kinerja	Status Kinerja	1.	1.00-1.80	Sangat Rendah	2.	1.81-2.60	Rendah	3.	2.61-3.40	Sedang	4.	3.41-4.20	Tinggi	5.	4.21-5.00	Sangat Tinggi	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Kemendagri																					
No.	Skor kinerja	Status Kinerja																																										
1.	1.00-1.80	Sangat Rendah																																										
2.	1.81-2.60	Rendah																																										
3.	2.61-3.40	Sedang																																										
4.	3.41-4.20	Tinggi																																										
5.	4.21-5.00	Sangat Tinggi																																										
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Sekretariat Daerah	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan																																							
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Sekretariat Daerah	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Sekretariat Daerah	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		Sekretariat Daerah																																							

24. SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kinerja DPRD	Indeks kepuasan anggota dewan terhadap layanan Sekretariat DPRD	<p>Hasil Survey Kepuasan DPRD</p> <p>Rumus indeks =</p> $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{X} \equiv N$ <p>N = bobot nilai per unsur</p> <p>Untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan DPRD unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :</p> $\text{Indeks Kepuasan DPRD} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Penimbang}} \times \text{Nilai}$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian indeks kepuasan DPRD yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :</p> $\text{Indeks Kepuasan DPRD unit pelayanan} \times 25$ <p>IKM Pelayanan :</p> <p>A (Sangat Baik) : 88,31 – 100,00 B (Baik) : 76,61 – 88,30 C (Kurang Baik) : 65,00 – 76,60 D (Tidak Baik) : 25,00 – 64,99</p>	Bagian Persidangan	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya layanan/dukungan terhadap penyelesaian produk hukum oleh DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan dari Ranperda	$\frac{\text{Jumlah Perdaya yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Ranperda}} \times 100\%$	Bagian Persidangan	
2	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah kinerja	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Sekretariat DPRD	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan Sekretariat DPRD	Tingkat capaian indikator sasaran Sekretariat DPRD	Capaian Indikator Sasaran		Sekretariat DPRD

25. KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	Kasi Pelayanan	Kemenpan
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan kelurahan	Persentase Kelurahan yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan/Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Jumlah Kelurahan/desa di kecamatan}} \times 100\%$	Kasi Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan
	Meningkatnya penyelenggaraan kinerja kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan yang aktif}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan}} \times 100\%$	Sekretaris Kecamatan	
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Padangsidimpuan Utara	Nilai SAKIP Kecamatan Padangsidimpuan Utara	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Sekretaris Kecamatan	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Padangsidimpuan Utara	Tingkat capaian indikator sasaran Kecamatan Padangsidimpuan Utara	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		Kecamatan

26. KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJAUTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Kasi Pelayanan	Kemenpan
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kinerja Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan yang aktif}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan}} \times 100\%$		
	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang berpartisipasi di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan/Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Jumlah Kelurahan/desa di kecamatan}} \times 100\%$		
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan Padangsidimpuan selatan	Nilai SAKIP Kecamatan Padangsidimpuan Selatan	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan		Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan	Tingkat capaian indikator sasaran daerah Kecamatan Padangsidimpuan Selatan	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		

27. KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan pelayanan publik kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Kasi Pelayanan	Kemenpan
	Meningkatnya penyelenggaraan kinerja kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan yang aktif}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan}} \times 100\%$		

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan desa/kelurahan	Persentase kelurahan/desa yang berpartisipasi di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan/Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Jumlah Kelurahan/desa di kecamatan}} \times 100\%$	Kasi Pembangunan & Kemasyarakatan	
	Meningkatnya kualitas dan sumber daya manusia seluruh aparatur perangkat desa dan tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	$\frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah desa di kecamatan}} \times 100\%$		
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Kantor Camat Padangsidimpuan Tenggara	Nilai SAKIP	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Sekretaris Camat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan Kantor Camat Padangsidimpuan Tenggara	Tingkat capaian indikator sasaran Kantor Camat Padangsidimpuan Tenggara	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		

28. KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan pelayanan publik kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Kasi Pelayanan	Kemenpan
	Meningkatnya penyelenggaraan kinerja kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan yang aktif}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan}} \times 100\%$		
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan desa/kelurahan	Persentase kelurahan/desa yang berpartisipasi di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Kel/Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Jumlah Kelurahan/desa di kecamatan}} \times 100\%$	Kasi Pembangunan & Kemasyarakatan	

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya kualitas dan sumber daya manusia seluruh aparatur perangkat desa dan tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	$\frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah desa di kecamatan}} \times 100\%$		
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Kantor Camat Padangsidimpuan Batunadua	Nilai SAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan.	Sekretaris Camat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan Kantor Camat Padangsidimpuan Batunadua	Tingkat capaian indikator sasaran Kantor Camat Padangsidimpuan Batunadua	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		Kecamatan

29. KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatkan pelayanan publik kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Kasi Pelayanan	Kemenpan
	Meningkatnya penyelenggaraan kinerja kecamatan	Percentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan yang aktif}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan}} \times 100\%$		Kecamatan
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan desa/kelurahan	Percentase kelurahan/desa yang berpartisipasi di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pada Kantor Camat Padangsidimpuan Hutaimbaru	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan/Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Jumlah Kelurahan/desa di kecamatan}} \times 100\%$	Kasi Pembangunan & Kemasyarakatan	
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Kantor Camat Padangsidimpuan Hutaimbaru	Nilai SAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan		Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan Kantor Camat Padangsidimpuan Hutaimbaru	Tingkat capaian indikator sasaran Kantor Camat Padangsidimpuan Hutaimbaru	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		Kecamatan

30. KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan pelayanan publik kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Kasi Pelayanan	Kemenpan
	meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan desa/kelurahan	Persentase Desa yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Jumlah Kelurahan/desa di kecamatan}} \times 100\%$		Kecamatan
	Meningkatnya penyelenggaraan kinerja Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan yang aktif}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan}} \times 100\%$		Kasi Pembangunan & Kemasyarakatan
	meningkatnya kualitas dan sumber daya manusia seluruh aparatur desa dan tata kelola pemerintah desa	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan Serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	$\frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah desa di kecamatan}} \times 100\%$		
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu	Nilai SAKIP Kecamatan Padangsidimpuan Angkola julu	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Sekretaris Camat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu	Tingkat capaian indikator sasaran Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		Kecamatan

31. INSPEKTORAT KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Penilaian dari BPKP	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	BPKP
	Maningkatnya Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP	Penilaian dari BPKP		

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Penanganan Resiko yang Menghambat Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan	Indeks Manajemen Resiko	Penilaian dari BPKP		
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan		Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan

32. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Indeks Pembangunan Komponen Kinerja dan Komponen Pengukuran Kinerja	Rata-rata Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan Komponen Pengukuran Kinerja dari Kemenpan RB	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kemenpan RB
	Meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Hasil Penilaian SAKIP dari Kemenpan RB		
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Hasil Penilaian SAKIP dari Kemenpan RB		
	Meningkatnya pencapaian pembangunan daerah dalam mewujudkan visi dan misi daerah	Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah	(= Akumulasi Capaian Indikator Sasaran Daerah / Total Jumlah Indikator Sasaran Daerah) x 100		Baplitbangda

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya penelitian dan pengembangan dalam pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan	(= Jumlah hasil penelitian yang di manfaatkan / Jumlah hasil penelitian yang di publikasikan) x 100		
		Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Indeks Inovasi dari Kemendagri		Kemendagri
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Baplitbangda	Nilai SAKIP Baplitbangda	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan		Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Baplitbangda	Tingkat capaian indikator sasaran Baplitbangda	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		Baplitbangda

33. BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Derajat Fisikal Otonomi Daerah	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Bidang Pendapatan	BPKPD
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{\text{Pendapatan tahun (n)} - \text{Pendapatan tahun (n-1)}}{\text{Pendapatan tahun (n-1)}} \times 100\%$		
	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	Opini BPK	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	Bidang Akuntansi	
	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	$\frac{\text{Parameter}}{\text{Sub Parameter}} \times 100\%$	Bidang Pengelolaan BMD	
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Tertib, Akuntable dan Transparan	Persentase Penyusunan APBD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	$\frac{\text{Penyesuaian APBD sesuai atau tidak sesuai peraturan}}{\text{Penyusunan APBD sesuai atau tidak sesuai peraturan}} \times 100\%$	Bidang Anggaran	
		Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang akurat dan sesuai standar	$\frac{\text{Pengelolaan kas daerah sesuai atau tidak sesuai standar}}{\text{Pengelolaan kas daerah sesuai atau tidak sesuai standar}} \times 100\%$	Bidang Perbendaharaan	
		Persentase Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan tepat waktu	$\frac{\text{Laporan keuangan sesuai atau tidak sesuai SAP}}{\text{Laporan keuangan sesuai atau tidak sesuai SAP}} \times 100\%$	Bidang Akuntansi	

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Akuntabilitas BPKPD Kinerja	Nilai SAKIP BPKPD	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Sekretariat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan BPKPD	Tingkat Capaian Indikator Sasaran BPKPD	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		BPKPD

34. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Capaian Penerapan Merit sistem	Indeks Merit Sistem	<i>Jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator × Nilai masing – masing jawaban indikator</i>	BKPSDM	BKPSDM
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian	Persentase aparatur yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	<i>Jumlah aparatur yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu</i> $\frac{\text{Jumlah aparatur yang mengusulkan pelayanan administrasi kepegawaian}}{\text{Jumlah total aparatur}} \times 100\%$		
		Persentase kesesuaian Kompetensi Pejabat Struktural dengan jabatan/tupoksi yang dijalankan	<i>Jumlah pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya</i> $\frac{\text{Jumlah seluruh jabatan struktural}}{\text{Jumlah pejabat struktural}} \times 100\%$		
2	Meningkatkan Profesionalitas Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	<i>Jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator × Nilai masing – masing jawaban indikator</i>		
	Meningkatnya Kompetensi Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	<i>Jumlah ASN yang terpenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihannya</i> $\frac{\text{Jumlah ASN (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$		
3	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah BKPSDM Kinerja	Nilai SAKIP BKPSDM	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	BKPSDM
	Meningkatkan Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan BKPSDM	Tingkat Indikator Sasaran BKPSDM	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		

35. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Stabilitas IPOLEKSOSBUD HAMKAM Daerah	Persentase Konflik Ipolesosbud, Hukum dan HAM yang di selesaikan	$\frac{\text{Jumlah laporan konflik Ipolesosbud, hukum dan HAM yang diselesaikan}}{\text{Jumlah total laporan konflik Ipolesosbud, Hukum dan HAM}} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya Penyelesaian Potensi Konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah Target Laporan Potensi Konflik Sosial - Jumlah yang Terrealisasikan Laporan Potensi Konflik Sosial X 12 Bulan X 100\%}}{\text{Jumlah laporan konflik Ipolesosbud, hukum dan HAM yang diselesaikan}} \times 100\%$		
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padangsidimpuan	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian indikator sasaran		

Pj. Wali Kota Padangsidimpuan,

Ttd.

Timur Tumanggor

Diundangkan di Padangsidimpuan pada tanggal 19 Juni 2024

Sekretaris Daerah
Kota Padangsidimpuan,

Ttd.

Letnan



BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPuan TAHUN 2024 NOMOR 25